

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
URUSAN WAJIB**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	100 %
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada 19 SOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP ttg Surat Masuk</li> <li>b. SOP ttg Surat Keluar</li> <li>c. SOP ttg Pengajuan Cuti Pegawai</li> <li>d. SOP ttg Pengajuan Permintaan GU</li> <li>e. SOP ttg Penerbitan Surat Keterangan Miskin</li> <li>f. SOP ttg Legalitas Surat Akta Kelahiran</li> <li>g. SOP ttg Surat Keterangan Pindah Domisili</li> <li>h. SOP ttg Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN).</li> <li>i. SOP ttg Kenaikan Gaji BerProsedur Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>j. SOP ttg Pengurusan</li> </ul>	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
						Rekomendasi Izin Tempat Usaha (SITU)HO. k. SOP ttg Pengurusan Rekomendasi Izin Keramaian l. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala m. SOP ttg Kenaikan Pangkat PNS n. SOP ttg Legalitas Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) o. SOP ttg Pengentrian Data Keuangan pasa SIPKD p. SOP ttg Penyusunan LAKIP q. SOP ttg Penyusunan LKPj r. SOP ttg Penyusunan LPPD	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada	0

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 10 personil	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	0.26%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jabatan.	88%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Ada 4 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada Renstra 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam Renstra, sebanyak 11 Program</li> </ul>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.</li> </ul>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</li> </ul>	100%
		Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.500.119.600,-</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 497.596.254,-</li> </ul>	97,50 %
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 58.486.078,-</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 57.325.800,-</li> </ul>	98,02%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.47.985.000</li> </ul>	14,96%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			dan jasa	dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.320.770.454	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 47.985.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 500.119.600	9,59%
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKD) yaitu: Laporan Barang Milik Daerah yang terdiri dari: - Buku Inventaris - Rekapitulasi Daftar Mutasi - KIB A, B, C, D, E, F - KIR	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- asset - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 934.973.699,- asset.	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/ prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Spanduk 3. PATEN 4. Pengumuman di mass media	Jumlah sebanyak 4 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	ada	77,29 %

TAPAN, JANUARI 2020

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

